

A. PENJELASAN UMUM

**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Stasiun
KIPM Baubau**

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau Merupakan salah satu UPT dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di daerah yang terletak di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Baubau yang melaksanakan tindakan perkarantinaaan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mencapai tujuan karantina yang diamanatkan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 untuk mensukseskan pembangunan Kelautan dan Perikanan di daerah Kotamadya Baubau dan Nasional pada umumnya memerlukan pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat terarah sesuai tujuan dan target serta berkesinambungan.

Adapun ASN di Stasiun karantina ikan berjumlah 11 orang, PPNP 10 orang dan PJLP 4 orang.

Rencana Strategis Stasiun KIPM Baubau :

Terdiri dari 1 visi, 1 misi, 3 tujuan dan 4 sasaran antara lain:

Visi : Hasil Perikanan yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya

Misi : Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu menjamin Lalu Lintas Hasil Perikanan yang

Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan terpercaya

Tujuan :

” Peningkatan lalulintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ”

Sasaran :

- ” Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dilingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan ”.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Stasiun KIPM Baubau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui SAKTI Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang terbagi dalam beberapa modul, persediaan, Aset Tetap, Akuntansi dan Pelaporan, piutang, dll. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,

persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Stasiun KIPM Baubau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Stasiun KIPM Baubau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Stasiun KIPM Baubau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Stasiun KIPM Baubau adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp2.000.000(dua juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2024 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahuunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Kantor Stasiun KIPM Baubau* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	0	0
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	0	0

*Realisasi
Pendapatan
Rp0,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Tahunan 2025 adalah sebesar Rp0,- atau mencapai 2 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Pendapatan Kantor Stasiun KIPM Baubau terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Karantina (42533)	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)		-	#DIV/0!
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi (42528)	-	-	#DIV/0!
Penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu (42591)	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Jasa Tahunan TA 2025 mengalami penurunan 90,762 persen dibandingkan Tahunan TA 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan Peraturan Pemerintah Tentang PNBK dari PP No. 75 Tahun 2015 ke PP No.85 Tahun 2025 yang isi perubahannya adalah tidak adanya lagi Pendapatan Jasa karantina antar domestic yang mana pada tahun-tahun lalu pendapatan jasa karantina untuk SKIPM Baubau lebih banyak diperoleh dari Pendapatan Jasa Karantina Domestik.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Karantina (42533)	-	-	#DIV/0!
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi (42528)	-	300,000	-100.00
Pendapatan Lain-lain (4259)	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	300,000	-100.00

Realisasi

Belanja Negara

Rp 0.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahunan TA 2025 adalah sebesar Rp 0,- atau 0% dari anggaran belanja sebesar Rp 0,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahunan TA 2025 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahunan TA 2025*

Uraian	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	76.00
Belanja Barang	-	-	56.00
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-

Dibandingkan dengan TA 2025, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami Penurunan sebesar (31,46)% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Adanya Realokasi Anggaran Ke Badan Karantina Indonesia sehingga terjadi

Penurunan Pagu di DIPA pada Tahuunan TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai		1,965,929,639	(100.00)
Belanja Barang		1,816,935,274	(100.00)
Belanja Modal	-		#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	-	3,782,864,913	(100.00)

*Belanja Pegawai
Rp0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahuunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp0,- dan Rp0,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Tahuunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar Minus (0) persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang naik pangkat dan naik grade Tunjangan kinerja (tukin).
2. Adanya penambahan pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	1,476,742,707	(100.00)
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	-	-	#DIV/0!
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	1,476,742,707	(100.00)
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	0	1,476,742,707	(100.00)

Belanja Barang
Rp 0,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahuunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- dan Rp1,816,935,274,- Realisasi Belanja Barang Tahuunan TA 2025 mengalami Penurunan (61)% dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya Pengurangan anggaran dari awal tahun TA 2025.

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 20245	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	0	686,640,021	(100.00)
Belanja Barang Non Operasional	0	18,029,000	(100.00)
Belanja Jasa	-	343,574,861	(100.00)
Belanja Pemeliharaan	-	226,749,451	(100.00)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	400,902,061	(100.00)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	64,546,884	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	0	1,740,442,278	(100.00)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	0	1,740,442,278	(100.00)

Belanja Modal
Rp0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahuunan TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada Tahunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar (100)% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh di Anggarkan Kegiatan Tersebut di TA 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangun	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan	0	0	0.00
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Tidak Ada Realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2025 sebesar Rp.0dan TA 2024 Rp0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp Rp0 mengalami Penurunan sebesar (100) persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp Rp0.- Hal ini disebabkan oleh diadakannya belanja Modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelolaan	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 Rp0,- dan TA 2024 Rp0,-

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 sebesar Rp.0,- dan TA 2024 Rp. Rp0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan TA 2025 dan TA 2024.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Tidak terdapat Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan TA 2025 dan 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2025 dan 2024*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
-	0	0	#DIV/0!
-	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp60,000,0000,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan
2024*

Keterangan	TH 2025	TH 2024
Uang Tunai	-	34,703,200
Bank Mandiri	-	25,296,800
Jumlah	-	60,000,000

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 September 2025 Dan 2025 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0., pembayaran jasa karantina di SKIPMKHP Baubau langsung ke kas Negara dengan menggunakan transaksi Billing dan rekening bank Bendahara Penerimaan di gunakan hanya untuk keperluan persyaratan pembuatan Electronic Data Capture (EDC) . Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
BSI 1057929673	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal Tahunan 2025 Rp0,- dan 2024 Rp0,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB **C.4 Piutang PNB**

Rp0,-

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 September 2025 Dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2025 dan 2024

Uraian	TH 2025	TH 2024
Piutang PNB (Pengembalian Tukin)	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/**
Tagihan **Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR

Rp0

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan

yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Nama	TH 2025	TH 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA
Rp0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 September 2025 Dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 September 2025 Dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan

Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar
TA 2025 dan 2024*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 September 2025 Dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan 0,- Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 September 2025 Dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2025 dan 2024*

Jenis	TH 2025	TH 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp 0,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2025 Dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan 64,546,884,- untuk pencatatan persediaan bahan baku di SKIPM BAUBAU menggunakan dua aplikasi yaitu aplikasi Persediaan dan Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium (SILAB) yang mana perbedaan dari Aplikasi ini adalah Aplikasi Persediaan yang Ada di BMN menggunakan perhitungan dengan satuan Kemasan/Botol sedangkan Aplikasi SILAB menggunakan perhitungan satuan Volume/gram pada TA 2025 tidak ada selisih antara

Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SILAB.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2025 Dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	-	5,382,774
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Pita Cukai, Materai dan Legas	-	-
Bahan Baku	-	59,164,110
Suku Cadang	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	64,546,884

Di Persediaan barang yang rusak/usang dengan Nilai biaya Rp0,-

Tagihan
TP/TGR
Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 September 2025 Dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 September 2025

adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024

No	Debitur	TH 2025	TH 2024
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
Jumlah		-	-

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0*

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA TA 2025 dan 2024

No	Debitur	TH 2024	TH 2023
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka

Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

Panjang per 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang
Jangka Panjang TA 2025*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah
Rp0,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Stasiun KIPM Baubau per 30 September 2025 Dan 2024 adalah sebesar Rp0.- dan Rp163,210,000.-Mutasi kurang sebesar Rp.(163,210,000) nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	163,210,000
Mutasi tambah:	0
Pengembangan Melalui KDP (208)	0
Mutasi kurang:	163,210,000
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2025	0

Rincian saldo Tanah per Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	500 m2	Jl. Anoa Waramosio kadolomoko	0
Jumlah			-

Rincian Tanah Transfer Keluar Ke SKIPM Kendari
Tahun 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	500 m2	Jl. Anoa Waramosio kadolomoko	163,210,000
Jumlah			163,210,000

Tidak ada Tanah yang dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

*Peralatan dan
Mesin
Rp0,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2025 Dan 2024 adalah Rp0,- dan Rp4,196,863,444,- Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	0
Hibah Barang	0
Koreksi tambah	
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar Online	-
Saldo per 31 Juni 2025	0
Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
Nilai Buku per 31 Juni 2024	0

Terdapat Mutasi tambah sebesar Rp0,- Pada Aset Peralatan dan Mesin dan mutasi kurang Transfer Keluar ke sebesar Rp 0 ,- dan Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.818.379.145,- sedangkan Saldo awal Rp 0,- Kegiatan pada periode Tahunan Tahun 2025 tidak terdapat ada Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Gedung dan
Bangunan
Rp0,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per Tahunan 2025 dan 2024 adalah Rp0,- dan Rp380,906,784,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	-
Penyelesaian pembangunan dgn KDP	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Perubahan Nilai Bangunan	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

pada periode Tahunan Tahun 2025 Terdapat Transfer Keluar ke SKIPM Kendari sebesar Rp 380,906,784 tidak ada kegiatan Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan.

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi Rp0,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	-
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025	-
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

Terdapat Transfer Keluar ke sebesar Rp 0 Tidak ada tambah Jalan Irigasi dan Jaringan pada periode Tahunan Tahun 2025.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2025 Dan 2024 adalah Rp0,- dan Rp41.785.000,- Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2025.

Rincian Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-	Monografi	0	0	0	-
Jumlah		0	0	0	0

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian KDP Gedung Bangunan Instalasi Stasiun KIPM Baubau Sebagai Berikut :

Nomor SP2D	Tanggal SP2D	SPK	Nilai SP2D
Jumlah			-

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing Rp(**Belum tutup per**) dan Rp(0). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Penyusutan jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp0*

C.21 Aset Tak Berwujud

Tidak terdapat Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per Tahunan 2025 dan 2024

Rincian Aset Tak Berwujud per Tahunan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud TA 2025

Uraian	Nilai Perolehan
-	0
-	0
Jumlah	0

*Aset Lain-Lain
Rp0*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2025 Dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak

berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 0 Juni 2025	-
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku per 30 Juni 2025	-

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0,- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per Tahunan 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 September 2025 Dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp60,000,000,- . Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2025 Dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Stasiun KIPM Baubau per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Tagihan Listrik Bulan September 2024	-	Beban Langganan Listrik
Tagihan Telefon Bulan September 2024	-	Beban Langganan Telfon
Tagihan Internet Bulan September 2024	-	Beban Langganan Internet
Tagihan PDAM Bulan September 2024	-	Beban Langganan PDAM
Pembayaran Kekurangan Gaji Bulan Januari s.d Desember 2024	0	Beban Gaji Pokok PNS
Total	-	

*Pendapatan
Diterima di
Muka*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 September 2025 Dan 2024. Pendapatan Diterima di Muka

Rp0

merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah
-	-
-	-
-	-
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0,-

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 September 2025 Dan 2024 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2025 dan TA 2024*

Uraian	TH 2024	TH 2023
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp0,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp942,411,860,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang

merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan
PNBP*

Rp0,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp300.000,- Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA2025 dan 2024

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
PNBP	300,000	0	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	0	0	#DIV/0!
Jumlah	300,000	0	#DIV/0!

Pendapatan Jasa berasal dari Pendapatan Jasa Karantina Perikanan Rp0,- dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standarisasi Lainnya Rp300.000.- (PP No.85 Thn 2024) Sedangkan Pendapatan Lain-Lain merupakan Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu Rp0,-

*Beban Pegawai
Rp0,-*

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan 0,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	0	0	#DIV/0!
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	#DIV/0!
Pengembalian beban Tuj PNS	-	-	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunj Khusus/kegiatan)	-	-	
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	
Beban Lembur	-	-	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Beban
Persediaan Rp0,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp64.546.884,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	5,382,774	(100)
Beban untuk pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Bahan Baku	-	59,164,110	(100)
Beban suku cadang	-	0	#DIV/0!
Jumlah Beban Persediaan	0	64,546,884	(100)

*Beban Barang
dan Jasa Rp0,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp1,034,237,277,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	0	1,034,237,277	(100)
Beban Penambah Daya Tahan tTubuh	0	0	#DIV/0!
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	#DIV/0!
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan	0	0	#DIV/0!
Beban Honor Output Kegiatan	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
Beban Daya dan Jasa	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	
Jumlah	0	1,034,237,277	-100.00

*Beban
Pemeliharaan
Rp0,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp289,448,951,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	T.A. 2025	T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,925,930	(100)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	112,518,796	(100)
Beban BMP dan Pelumas	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	8,055,250	(100)
Beban persediaan suku cadang	0	2,192,400	(100)
Jumlah	0	124,692,376	-100.00

*Beban Perjalanan
Dinas Rp0,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp400,902,061,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	0	400,902,061	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	-
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2025 dan 2025

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

*Beban
Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahunan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	-	-
Jumlah	0	-	-

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp0,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp,- dan Rp206,240,875,-

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

TA2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	148,431,214	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	56,746,241	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	1,063,420	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	206,240,875	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	206,240,875	-

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2025	TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(0),-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2025	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	-
Surplus Pedapatan dari kegiatan Non Oprasional Lainnya	0	0	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Beban Persediaan Rusak	0	0	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	-

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa
Rp0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	-	-
Beban Perjalanan Dinas	0	-	-
Beban Persediaan	0	-	-
Jumlah	0	-	-

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp5,801,175,208,-

Defisit LO
Rp(0)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 Dan 2024 adalah sebesar Rp(4,098,089,045) dan Rp4,098,089,045) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 Dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan

untuk tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

Revaluasi Aset

Tetap Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

Koreksi Aset

Tetap Non

Revaluasi Rp0,-

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahunan 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas	-
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-
Lain Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 Dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

*Transaksi Antar
Entitas
Rp(863,288,674),-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2025 Dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0),- dan Rp1,739,983,678,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	-

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Tahunan 2025, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal Tahunan 2025 sebesar Rp,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	-	-
3	Persediaan	Sertifikat HC	-
Jumlah			-

Sedangkan Transfer Keluar ke Badan Karantina Indonesia sampai dengan tanggal 31 2025 sebesar Rp0,- dengan rincian Aset Sebagai Berikut :

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah

Langsung sampai dengan tanggal Tahunan 2025 sebesar Rp0-. yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal Tahunan 2025 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2	-	-	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal Tahunan 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp Rp0,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada Tahun Anggaran 2025 Stasiun KIPM Baubau tidak Memiliki DIPA dan menjadi satker Inaktif bersaldo, Anggaran di gabung ke Stasiun KIPM Kendari
2. **Kegiatan Prioritas Nasional (Dipa)**
3. **Tematik APBN**
4. **Capaian Output Strategis Nasional**